

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

DINA JAYANTRI EKA PUTRI
NIM : 14622057



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh :

DINA JAYANTRI EKA PUTRI
NIM : 14622057

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : DINA JAYANTRI EKA PUTRI
NIM : 14622057

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Nurfitri Zulaika, SE., M. Ak. Ak. CA
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Andri Tonnaya, S.E., M. Ak
NIDN. 8823900016 / Asisten Ahli

Mengetahui
Ketua Program Studi

Hendy Satria, SE., M. Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

NAMA : DINA JAYANTRI EKA PUTRI
NIM : 14622057

Telah dipertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua

Sekretaris

Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak. Ak., CA
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Hendy Satria, SE., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Anggota

Rachmad Chartady, SE., M.Ak
NIDN. 1023049101 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 27 September 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Ketua,

Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801/Lektor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DINA JAYANTRI EKA PUTRI
NIM : 14622057
Tahun Angkatan : 2014
Indeks Prestasi Kumulatif : 2,98
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata – 1 (Satu)
Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tanjungpinang, 27 September 2021
Penyusun,

DINA JAYANTRI EKA PUTRI
NIM : 14622057

MOTTO

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.”

(Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak)

~Albert Einstein~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karyaku ini kupersembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku yang selalu memberikan semangat dan doanya, Suami Tercinta beserta anak-anakku terimakasih atas segala doa dan perjuangannya untukku hingga akhirnya skripsi ini dapat kuselesaikan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Penulis ucapkan atas nikmat kesehatan yang diberikan Allah SWT dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi yang berjudul : **“PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG”**.

Penulisan skripsi ini tentunya merupakan proses dengan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga yaitu kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE., Ak., M.Si., CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
6. Ibu Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak., Ak., CA selaku Pembimbing I yang selama ini sudah banyak membantu memberikan masukan dalam skripsi ini, membantu

dalam segala kemudahan dan memberikan semangat hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

7. Bapak Andry Tonaya,SE.,M.Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan yang berguna dalam penelitian ini, dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan. Khususnya Dosen Program Studi Akuntansi yang telah mendidik penulis selama penulis menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan.
9. Untuk seluruh teman seangkatan, semoga kita semua bisa bertemu di titik kesuksesan

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman penulis. Kritik dan saran pun yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang membacanya.

Tanjungpinang, Oktober 2021

Penulis

DINA JAYANTRI EKA PUTRI
NIM : 14622057

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5.1 Kegunaan Ilmiah	10
1.5.2`Kegunaan Praktis	10
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Teori	12
2.1.1. Akuntansi Sektor Publik.....	12
2.1.2 <i>Good Governance</i>	15
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	23
2.2. Kerangka Pemikiran	27
2.3. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33

3.2. Jenis Data	33
3.3. Teknik Pengumpulan Data	34
3.4. Populasi dan Sampel	35
3.5. Definisi Operasional	38
3.6. Teknik Pengolahan Data	39
3.7. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Hasil Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
4.1.2 Karakteristik Responden	46
4.1.3 Pengujian Instrumen Penelitian.....	47
4.1.4 Rekapitulasi Tanggapan Responden.....	49
4.2. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Daftar SKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang	5
Tabel 3.1	Populasi	35
Tabel 3.2	Sampel Penelitian.....	37
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 3.4	Tabel Interval Kelas	43
Tabel 4.1	Pengujian Validitas Instrumen Penelitian	48
Tabel 4.2	Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	49
Tabel 4.3	Rekapitulasi Tanggapan Responden Indikator Akuntabilitas	49
Tabel 4.4	Rekapitulasi Tanggapan Responden Indikator Transparansi	51
Tabel 4.5	Rekapitulasi Tanggapan Responden Indikator Keterbukaan	52
Tabel 4.6	Rekapitulasi Tanggapan Responden Indikator Aturan Hukum	54

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Gambar 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Tabel Induk
Lampiran 2	: Hasil Olahan Data
Lampiran 3	: Surat Keterangan dari Objek Penelitian
Lampiran 4	: Hasil Plagiarism Turnitin

A B S T R A K

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Dina Jayantri Eka Putri. 14622057

Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Email : dinaekaputri17@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penerapan *prinsip governance* dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah Pengguna Anggaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan pada tiap-tiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sehingga jumlah sampel sebanyak 66 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teknik *purposive*, yang berarti informan ditentukan berdasarkan dari tujuan dan kebutuhan.

Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum, hasilnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai penerapan *Good Governance* pada Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap data yang telah diperoleh melalui kuesioner.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah dengan baik melaksanakan tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan pemerintah daerah, hal ini diketahui dari hasil rekapitulasi tanggapan responden yang berada pada skor dengan skala sangat baik, Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengelola keuangannya sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik, ini tentunya menunjukkan indikasi baiknya penerapan *Good Governance* yang sangat penting untuk dilaksanakan pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan *good governance* dalam unsur keterbukaan pengelolaan keuangan sudah diterapkan dengan baik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang, aturan hukum dalam menerapkan *good governance* terutama dalam pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat pengelolaan keuangan sangat erat kaitannya dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *Good Governance*, Transparansi, Keterbukaan, Aturan Hukum

Dosen Pembimbing I : Nurfitri Zulaika,SE.,M.Ak.Ak., CA

Dosen Pembimbing II : Andry Tonaya,SE.,M.Ak

A B S T R A C T

**APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN REGIONAL
FINANCIAL MANAGEMENT IN GOVERNMENTS
TANJUNGPINANG CITY**

Dina Jayantri Eka Putri. 14622057
Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
Email : dinaekaputri17@gmail.com

The purpose of this study is how to apply the principles of governance in the management of regional finance at the Tanjungpinang City Government. This type of quantitative descriptive research. The sample in this study is the Budget User and the Head of the Finance Sub-Section in each SKPD in the Tanjungpinang City Government so that the number of samples is 66 peoples. The sampling technique used in this research is based on purposive technique, which means that the informant is determined based on the goals and needs.

The method in this research is quantitative. The data analysis technique used in this study is a quantitative analysis technique using frequency tables, namely analyzing data by describing or describing the data that has been collected and presenting it in the form of numbers without intending to make generally accepted conclusions, the results are described descriptively with provides an overview of the implementation of Good Governance in the Tanjungpinang City Government to the data that has been obtained through a questionnaire.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Tanjungpinang City Government has properly carried out its responsibilities in managing local government finances, it is known from the results of the recapitulation of respondents' responses which are on a very good scale, the Tanjungpinang City Government in managing its finances has implemented the principle of transparency by Well, this certainly shows a good indication of the implementation of Good Governance which is very important to be implemented in the financial management of local governments.

The implementation of good governance in the element of openness in financial management has been well implemented in the Tanjungpinang City Government. The rule of law in implementing good governance, especially in financial management, is a very important thing to do considering that financial management is very closely related to applicable law.

Keywords: Good Governance, Transparency, Openness, Rule of Law

*Advisor I : Nurfitri Zulaika, SE.,M.Ak.Ak., CA
Advisor II : Andry Tonaya,SE.,M.Ak*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah mengandung arti suatu kelembagaan atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Penguasa dalam hal ini pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum, yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara yang harus mempunyai wewenang. Seiring dengan perkembangan, fungsi pemerintahan ikut berkembang, dahulu fungsi pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum, akan tetapi pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*).

Pemerintah Daerah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip *good governance* (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*publik goods dan services*). Prinsip-prinsip *good governance* antara lain adalah prinsip efektifitas (*effectiveness*), keadilan (*equity*), partisipasi (*participation*), akuntabilitas (*accountability*), dan transparansi (*transparency*).

Pada sisi lain, pemerintah daerah atau lokal sebagai lembaga negara yang mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut pula pertanggungjawaban terhadap publik yang dilayaninya, artinya pemerintah lokal harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan dan pekerjaannya kepada publik yang sering disebut menjalankan prinsip akuntabilitas (*accountability*). Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam praktiknya, konsep *good governance* harus mendapat dukungan dan komitmen dari semua pihak yaitu negara (*state*)/pemerintah (*government*), swasta (*private*) dan masyarakat (*society*).

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Good governance* telah menjadi isu sentral, sejak adanya era globalisasi. Tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam konteksnya merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik

maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.

Menerapkan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *good governance*. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil, dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan penting yang melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *good governance* di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh *stakeholders*, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *governance* yang melakukan interaksi sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik. Menurut (Sedarmayanti, 2012) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), ada beberapa unsur penting antara lain:

1. Akuntabilitas yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggungugat atas segala tindakan dan kewajiban yang ditetapkan.
2. Transparansi, pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik pada tingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum: pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah merupakan salah satu hal penting yang patut diperhatikan mengingat pertanggungjawaban penggunaan keuangan dalam hal ini merupakan hal yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dituntut untuk dapat dipublikasikan dimana hal tersebut merupakan salah satu upaya transparansi pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance*. Dengan adanya keterbukaan informasi atas laporan keuangan menjadikan pemerintah daerah dapat bertanggungjawab atas anggaran yang didapatkan. Salah satu peran dan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Karakteristik kualitatif kualitas informasi keuangan pada LKPD yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami mampu memberikan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan kebijakan manajerial. Pemerintah Daerah membutuhkan informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD tersebut untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal yang dituangkan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Dengan demikian, LKPD diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Evicahyani & Setiawina, 2016).

Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang yang dikerjakan. Berikut merupakan nama SKPD pada Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Website www.tanjungpinangkota.co.id :

Tabel 1.1
Daftar SKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang

No	Nama SKPD
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Badan Layanan Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Lingkungan Hidup
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Pendidikan
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
19	Dinas Perhubungan
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip
21	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
22	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan
23	Dinas Sosial
24	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro
25	Inspektorat Daerah
26	Kecamatan Bukit Bestari
27	Kecamatan Tanjungpinang Barat
28	Kecamatan Tanjungpinang Kota
29	Kecamatan Tanjungpinang Timur
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
31	Sekretariat Daerah
32	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
33	Sekretariat DPRD

Sumber : www.tanjungpinangkota.co.id, 2020

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan transparansi laporan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang diantaranya yaitu publikasi anggaran secara berkala sebagai bentuk informasi terhadap publik atas anggaran yang sudah digunakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PP 12/2019). APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. APBD menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD adalah pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode.

Pengelolaan APBD yang baik menerapkan prinsip *Value for Money* (VfM). *Value for Money* merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2010). Pentingnya penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan pemerintah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang harus lebih diperhatikan, hal ini agar dapat memberikan dampak baik bagi kelancaran pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Agar prinsip *Value for Money* dapat diterapkan maka harus ditunjang juga dengan pelaksanaan *Good Governance* yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas sehingga

pemanfaatan APBD yang hemat, adil, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat tercapai.

Penggunaan APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu menerapkan prinsip *Good Governance* agar penggunaan APBD berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang disusun pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal-hal yang penting tersebut di atas merupakan fenomena penelitian yang membuat penulis tertarik untuk mengambil judul “**Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang**”

1.2 Rumusan Masalah

Lingkup penelitian ini menguraikan mengenai pentingnya penerapan *Good Governance* Berdasarkan lingkup penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang?
3. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang?
4. Bagaimana penerapan aturan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang?

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini membahas tentang Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Akuntabilitas
 - b. Transparansi
 - c. Keterbukaan
 - d. Aturan hukum
2. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang?
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang?

4. Untuk mengetahui bagaimana penerapan aturan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang?

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya perkembangan teori-teori akuntansi terutama dalam penerapan prinsip *Good Governance*, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti lebih jauh dan mendalam terhadap hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan acuan bagi instansi pemerintah dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penyampaian informasi berdasarkan urutan data dan aturan logis dari penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian dimana dalam penelitian ini berkenaan tentang penerapan prinsip *Good Governance*, kerangka pemikiran serta penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang diambil yang disertai dengan jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel definisi operasional, pengolahan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atas kesimpulan yang didapatkan dari penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Menurut *Accounting Principle Board* yang dikutip oleh (Kusufi, 2013) Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara alternatif arah dan tindakan.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2010*), akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi/peran akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi.

2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Abdul Halim, 2012) memberikan definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Menurut (Nordawan, 2010) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah

daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi pada pemerintahan adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Selain itu, akuntansi pemerintahan mengacu pada penerapan teori, prinsip atau standar akuntansi pada organisasi yang tidak mencari laba, khususnya unit organisasi pemerintahan.

Akuntansi sektor publik memiliki manfaat-manfaat yang pada dasarnya adalah mewujudkan tujuannya. Manfaat tersebut dapat diperoleh jika akuntansi sektor publik dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Fungsi Akuntansi Sektor Publik meliputi aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan transaksi keuangan pemerintah. Akuntansi Sektor Publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Laporan keuangan sektor publik juga merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009).

2.1.2 *Good Governance*

2.1.2.1 Pengertian *Governance*

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank dalam (Mardiasmo, 2009) memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*” yang artinya kekuasaan negara digunakan dengan cara mengelola sumber daya ekonomi dan sosial bagi perkembangan masyarakat. Sedangkan *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels*”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.

Pemerintahan yang baik merupakan cita negara berdasarkan hukum, dimana masyarakatnya merupakan *self regulatory society*. Dengan demikian, pemerintah sudah dapat mereduksi perannya sebagai pembina dan pengawas implementasi visi dan misi bangsa dalam seluruh sendi-sendi kenegaraan melalui pemantauan terhadap masalah-masalah hukum yang timbul dan menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat dan sebagai fasilitator yang baik. Dengan pengembangan sistem informasi yang baik, kegiatan pemerintahan menjadi lebih transparan, dan akuntabel, karena pemerintah mampu menangkap *feedback* dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Menurut (Mardiasmo, 2010) *Governance* yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka.

2.1.2.2 Pengertian *Good Governance*

Good Governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan demikian ranah *Good Governance* tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga sektor swasta.

Singkatnya, tuntutan pada *Good Governance* tidak selayaknya ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di luar struktural birokrasi pemerintahan secara bersama menuntut penyelenggaraan *Good Governance* pada negara. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (*multi stakeholders*) baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah, sedangkan (Andianto, 2012) menyatakan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publik goods*

and *service*. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi / lembaga dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik.

Keberadaan *governance* menurut (Subarsono, 2011) digunakan karena institusi pemerintah (*government*) tidak lagi memadai jika diperlakukan sebagai satu-satunya institusi untuk menjalankan fungsi pemerintah.

Model-model untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, menurut UNDP dalam (Sedarmayanti, 2012) antara lain :

1. Model pemerintahan ekonomi (*economic governance model*) meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi.
2. Model pemerintahan politik (*political governance model*) : mencakup proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan .
3. Model pemerintahan administratif (*administrative governance model*) : sistem implementasi kebijakan.

Implementasi dari *good governance* di era reformasi ditandai adanya kelembagaan dalam *governance* yang melibatkan secara aktif keberadaannya terhadap 3 komponen yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Negara menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, adapun masyarakat memfasilitasi interaksi sosial

budaya politik, menggerakkan kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Pada dasarnya konsep *Good Governance* memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*Civil Society*). *Good Governance* juga mempunyai arti pandangan dari sebuah kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (*Civil Society*), dan sektor swasta. *Good Governance* adalah *policy stakeholders* forum artinya kelompok – kelompok masyarakat yang dilibatkan adalah perwakilan elemen-elemen yang terpengaruh oleh kebijakan publik yang sedang proses. Kesepakatan itu mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga (elemen-elemen) di mana kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya.

Kooiman dalam (Sedarmayanti, 2012) mengemukakan bahwa *governance* ialah serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya, istilah *governance* bukan hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan saja, melainkan juga mengacu kepada arti pengurusan, pengarahan, pengelolaan, dan pembinaan penyelenggaraan. Dan berdasarkan dari apa yang diungkapkan oleh Kooiman di atas, dapat dipahami bahwa keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan merupakan semangat yang terdapat dalam konsep *good governance*.

Menurut (Handiwinata, 2010), asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian) dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efisiensi). *Good Governance* adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan dilakukan dengan efektif dan efisien, *responsive* terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel dan serta transparan (Santosa, 2009). Sesuai dari interpretasi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa, pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang baik dalam ukuran proses maupun hasil- hasilnya. Semua unsur-unsur dalam pemerintahan biasa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan rakyat serta melibatkan semua elemen untuk mengambil kebijakan publik, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan terwujudnya masyarakat madani (*Civil Society*).

Pierre Landell-Mills & Ismael Seregeldin dalam (Santosa, 2009) mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak terlepas dari peran masyarakat, dan *stakeholder* yang berkepentingan (sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat/NGOs dan elit politik) demi memajukan pembangunan serta pemerintahan daerah yang berguna bagi masyarakat. Dengan demikian, maka wujud *good governance* adalah pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang solid, kondusif, dan bertanggungjawab dengan

menjaga sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, nyata, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berkesinambungan, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Keberadaan *governance* menurut (Subarsono, 2011) digunakan karena institusi pemerintah (*government*) tidak lagi memadai jika diperlakukan sebagai satu-satunya institusi untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Implementasi dari *good governance* di era reformasi ditandai adanya kelembagaan dalam *governance* yang melibatkan secara aktif keberadaannya terhadap 3 komponen yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Negara menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, adapun masyarakat memfasilitasi interaksi sosial budaya politik, menggerakkan kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Cita negara berdasarkan hukum, dimana masyarakatnya merupakan *self regulatory society*. Dengan demikian, pemerintah sudah dapat mereduksi perannya sebagai pembina dan pengawas implementasi visi dan misi bangsa dalam seluruh sendi-sendi kenegaraan melalui pemantauan terhadap masalah-

masalah hukum yang timbul dan menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat dan sebagai fasilitator yang baik. Dengan pengembangan sistem informasi yang baik, kegiatan pemerintahan menjadi lebih transparan, dan akuntabel, karena pemerintah mampu menangkap *feedback* dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Konsep dasar dari pemerintah (*government*) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Di tingkat Pemerintahan Pusat maka konsep Pemerintah (*Government*) merujuk pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara beserta para kabinet pemerintahan. Sedangkan Tata Pemerintahan (*Governance*) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada.

Pada tingkat Pemerintahan Negara, konsep Tata Pemerintahan (*Good Governance*) merujuk pada pola hubungan antara pemerintah Indonesia (Presiden dan Kabinet), kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan. Hubungan yang diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsional antara empat kelembagaan tersebut.

Dengan demikian cakupan Tata Pemerintahan (*Governance*) lebih luas dibandingkan dengan Pemerintah (*Government*), karena unsur yang terlibat dalam Tata Pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada pada pemerintahan Indonesia, termasuk di dalamnya ada unsur Pemerintah (*Government*). Dalam hal

ini tata pemerintahan melibatkan unsur swasta dan masyarakat di dalamnya selain pemerintah itu sendiri.

2.1.2.3 Indikator Good Governance

Menurut (Sedarmayanti, 2012) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), ada beberapa unsur penting antara lain:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggungugat atas segala tindakan dan kewajiban yang ditetapkan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggaraan negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terstruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

2. Transparansi

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan

3. Keterbukaan

Keterbukaan yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Keterbukaan adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan

informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan.

4. Aturan hukum

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 (Indonesia, 2019), pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut (Heru Rochmansjah dan Chabib Sholeh, 2010), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

- a. Akuntabilitas
- b. *Value for money*
- c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik
- d. Transparansi
- e. Pengendalian

Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- a. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
- b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
- c. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
- d. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberi informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi yang berupa laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas publik.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2012) laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (IAI, 2012). Definisi tersebut didukung oleh (Munawir, 2010) yang mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Menurut (Mardiasmo, 2011) laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah merupakan bagian dari pelaporan

keuangan yang memuat suatu elemen struktur kekayaan dan struktur keuangan yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi pemerintah daerah pada suatu periode tertentu.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*, 2010) dalam kerangka konseptualnya mengemukakan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

- a. Akuntabilitas
- b. Manajemen
- c. Transparansi

Informasi dalam laporan keuangan tidak ditujukan kepada kelompok pengguna tertentu melainkan kepada semua pengguna tanpa membedakan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, informasi tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan mereka yang dipandang serupa. Pemakai laporan

keuangan sektor publik dapat diidentifikasi dengan menelusuri *stakeholder* organisasi.

Pengertian keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Indonesia, 2019) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut (Abdul Halim, 2012) mengemukakan pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 (Indonesia, 2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut (Abdul Halim, 2012) mengemukakan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Tanggungjawab
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna dan kegiatan bunga
5. Pengendalian

Sumber-sumber keuangan daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

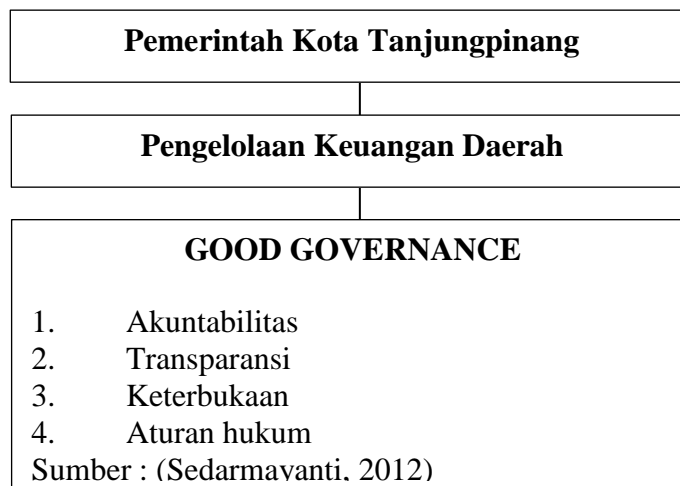
Pasal 285 (Indonesia, 2004), meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu diagram yang menggambarkan garis besar tujuan penelitian dalam penelitian ini, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Konsep yang disesuaikan dalam penelitian, 2020

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Masnun (2018) *Good Governance* Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Suatu Kajian Di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *good governance* dan peran auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa opini yang diberikan oleh auditor mencerminkan seberapa besar dan luas prinsip-prinsip *good governance* tersebut telah dijalankan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah mematuhi standar akuntansi pemerintahan, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Pemeriksaan dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih

transparan dan akuntabel. Akuntabilitas pemerintah antara lain terlihat dari opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Semakin baik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan. Dengan diperolehnya opini WTP oleh suatu LKPD, menunjukkan akuntabilitas semakin baik dan telah dilaksanakannya *good governance*. Sedangkan perolehan opini selain WTP menunjukkan rendahnya akuntabilitas dan belum terlaksananya *good governance*.

2. Indrawati (2012) Prinsip *Good Financial Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan *Clean Governance*. Implementasi prinsip *good financial governance* dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara akan mampu menciptakan *clean governance*. Sebagai implementasi dari asas legalitas dan asas kepastian hukum, maka pengenaan sanksi dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Selain itu sanksi tersebut diberikan oleh lembaga yang berwenang setelah melalui beberapa prosedur pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang fungsi *budgeting* dan fungsi pengawasan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

3. Muhamad Pazri (2016) Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan sifat penelitian deskripsi yaitu memberikan paparan atau gambaran mengenai Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia dan menemukan bagaimana mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjadi prinsip *Good Governance*. Adapun hukum yang digunakan adalah tindakan hukum primer sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur. Setelah semua bahan dari berbagai literatur serta bahan penelitian terkumpul maka bahan-bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Menurut hasil dan penelitian tesis ini menunjukkan bahwa: Pertama, Prasyarat minimal untuk mencapai *Good Governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kedua, Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah selalu dilakukan pembaharuan

4. Anissa Adriana (2018) *Analysis of Local Financial Management Transparency Based on Websites on Local Government in Java*. Indeks rata-rata transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Jawa untuk tahun fiskal 2016 masih rendah yaitu hanya 19,59%. Hasil kategorisasi tingkat pengungkapan informasi publik menurut *Open Budget Index* (OBI) menunjukkan bahwa untuk tahun fiskal 2016 semua pemerintah daerah di Jawa berada dalam kategori tidak mencukupi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Jawa masih menganggap informasi manajemen keuangan daerah sebagai sesuatu yang tidak cukup penting untuk ditampilkan kepada publik atau lebih baik tidak dikomunikasikan kepada masyarakat umum. Secara umum, sepuluh pemerintah kabupaten / kota di Jawa dengan tingkat transparansi tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki karakteristik tingkat kesejahteraan, kekayaan pemerintah daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan visibilitas pers yang lebih tinggi dan lebih rendah persaingan politik dibandingkan ke sepuluh kabupaten / kota di Jawa dengan transparansi terendah dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Gendro Wiyono (2018) *The Community Perception To Good Governance Implementation Of Village Funds In Bantul Regency*. Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal namun masih menghadapi beberapa kendala yang belum bisa dipetakan dan diselesaikan. Banyaknya pemerintahan desa di Kabupaten Bantul, ada yang belum mengembangkan dan memanfaatkan dana desa sesuai dengan

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana harapan masyarakat. Artinya, dalam pelaksanaan pelaksanaan dana desa masih dibutuhkan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan desa untuk berkinerja baik dan mematuhi prinsip. Indikasi masalah yang muncul meliputi: (1). Alokasi Dana Desa masih belum memenuhi standar operasional dan kebutuhan warga desa, (2). Penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran desa belum mengikuti proses dan tahapan sebagaimana mestinya, (3). Akun pendapatan dan kode akun yang salah, (4). Proporsi antara pengeluaran operasional yang tidak merata dan pengeluaran pembangunan, (5). Laporan keuangan sering terlambat

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, biasanya digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian, penganalisisan data yang bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk melakukan pengujian hipotesis yang telah ditentukan. Metode ini juga diartikan sebagai metode penelitian yang berupa serangkaian angka dan penggunaan statistik dalam menganalisis data (Sugiyono, 2016a). Dengan demikian penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang, kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana kenyataan di lapangan.

3.2 Jenis Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data informasi yang berasal dari informan yang diperoleh melalui obyeknya langsung yang disebut responden, yaitu meliputi orang-orang yang diteliti dan akan dimintai keterangan atau informasinya melalui penyebaran kuesioner.

Data sekunder yaitu data yang berfungsi sebagai pelengkap, bisa diperoleh dari berbagai sumber, serta bahan-bahan laporan ataupun arsip-arsip surat dan dokumen-dokumen yang tersedia sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait Good Governance dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data penelitian maka digunakan teknik, yaitu:

1. Kuesioner

Menurut (Sugiyono, 2016b), “Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Kuesioner ini akan diisi oleh sampel yang sudah dipilih sehingga data yang didapat lebih efektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala *likert*. Dimana penggunaan skala ini berdasarkan dimensi dari *likert* yang dikemukakan oleh Maslach dan Jackson, yang kemudian peneliti terjemahkan dan kembangkan ke dalam Bahasa Indonesia serta disesuaikan dengan situasi tempat penelitian.

2 Observasi.

Teknik pengumpulan data secara observasi mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sugiyono, 2015) yang mengemukakan bahwa teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan proses psikologis diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan.

Dalam penelitian yang dilakukan ini, observasi yang peneliti gunakan yaitu observasi terstruktur yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya, dengan alat pengumpul data yaitu *Check List*.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2015) “Populasi adalah objek-objek yang mempunyai kuantitatif tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Tanjungpinang. Adapun nama SKPD dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 3.1
Populasi

No	Nama SKPD
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Badan Layanan Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Lingkungan Hidup
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Pendidikan
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
19	Dinas Perhubungan

No	Nama SKPD
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip
21	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
22	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan
23	Dinas Sosial
24	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro
25	Inspektorat Daerah
26	Kecamatan Bukit Bestari
27	Kecamatan Tanjungpinang Barat
28	Kecamatan Tanjungpinang Kota
29	Kecamatan Tanjungpinang Timur
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
31	Sekretariat Daerah
32	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
33	Sekretariat DPRD

Sumber : www.tanjungpinangkota.co.id, 2020

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasi. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, maka akan ditetapkan dari populasi yang ada. Selanjutnya dalam menentukan sampel, penelitian sampel diserahkan pada pertimbangan-pertimbangan pengumpulan data yang telah diberi penjelasan oleh peneliti akan mengambil siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Pengguna Anggaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Adapun teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Non Probability Sampling* dengan jenis *puspositive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2012) teknik *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis *Nonprobability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive*

Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Dengan sampel dalam penelitian ini berjumlah 66 orang. Rincian sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No	Nama SKPD	Sampel
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat	2
3	Badan Layanan Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah	2
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
11	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2
13	Dinas Lingkungan Hidup	2
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	2
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
17	Dinas Pendidikan	2
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2
19	Dinas Perhubungan	2
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2
21	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	2
22	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	2
23	Dinas Sosial	2
24	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	2
25	Inspektorat Daerah	2
26	Kecamatan Bukit Bestari	2
27	Kecamatan Tanjungpinang Barat	2
28	Kecamatan Tanjungpinang Kota	2
29	Kecamatan Tanjungpinang Timur	2
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	2
31	Sekretariat Daerah	2
32	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	2
33	Sekretariat DPRD	2
Total		66

Sumber : Peneliti, 2020

3.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Creswell (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa definisi operasional adalah spesifikasi bagaimana suatu variabel yang akan diteliti didefinisikan secara operasional dan diukur.

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	<i>Good Governance</i>	(Andianto, 2012) menyatakan bahwa <i>good governance</i> merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan <i>publik goods and service</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggungugat atas segala tindakan dan kewajiban yang ditetapkan. 2. Transparansi, pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. 3. Keterbukaan, yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. 4. Aturan hukum: pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa

No	Variabel	Definisi	Indikator
			jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Sumber : Konsep yang disesuaikan dengan penelitian, 2020

3.6 Teknik Pengolahan Data

Menurut (Sugiyono, 2011) data kuantitatif diolah dan dianalisis menggunakan kriteria. Untuk mengolah dan menganalisis data, ada dua macam statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu kriteria penelitian melalui pengukuran. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi. Agar data dapat dikelompokkan secara baik, perlu dilakukan kegiatan awal sebagai berikut :

- 1) *Editing*, adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Dengan menggunakan kata-kata atau bagian dari kata-kata yang ada pada transkrip, analisis terhadap file data yang sangat banyak akan dapat dilakukan dengan lebih mudah akurat. (Bungin, 2017).
- 2) *Coding*, setelah tahap *editing* selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasi data-data tersebut melalui tahapan *coding*. Maksudnya adalah data yang telah *di edit* tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis (Bungin, 2017).

- 3) *Scoring*, adalah tahap mengubah data yang bersifat kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif (skor nilai) (Bungin, 2017). Dalam penentuan skor nilai ini digunakan skala *likert* dengan empat kategori penilaian yaitu sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, cukup diberi skor 3, kurang setuju diberi skor 2, dan tidak setuju diberi skor 1.
- 4) *Tabulating*, adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel. Sampai pada tahap ini proses pengolahan data sudah selesai dan data siap untuk dianalisis secara kuantitatif dengan menerapkan rumus-rumus tertentu (Bungin, 2017).

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan pertanyaan dalam kuesioner layak untuk dapat memprediksi variabel penelitian. Uji instrumen penelitian dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut :

3.7.1.1. Uji Validitas

Menurut (Sunyoto, 2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Validitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan suatu instrumen (yang dalam hal ini dimaksudkan adalah alat ukur). Instrumen yang dapat dikatakan valid jika mampu

mengukur apa yang diinginkan, dengan demikian dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Nilai tinggi ataupun rendahnya validitas sebuah instrumen yang digunakan mengindikasikan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran mengenai validitas yang dimaksud (Anshori & Iswati, 2009). Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan *SPSS 25.0 for windows*. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Bivariate Pearson (korelasi pearson product moment)* analisis ini digunakan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang diungkap. Koefisien korelasi item-item dengan *Bivariate Pearson* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R_{ix} = \frac{n (\sum ix) - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{\{n \sum i^2 - (\sum i)^2\} \{n \sum x^2 - (\sum x)^2\}}}$$

Sumber : Buku Sunyoto 2011

Dimana :

R_{ix} = Koefisien korelasi item-total (*Bivariate Pearson*)

I = Skor item

X = Skor total

N = Banyaknya subjek

Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah jika $r = 0,3$. Jadi, apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam tersebut dinyatakan tidak valid.

3.7.1.2. Uji Reliabilitas

Suhaimi dalam (Sunyoto, 2011) menyatakan reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan *SPSS 25.0 for windows*. Butir kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila *cronbach's alpha* > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel apabila *cronbach's alpha* < 0,60.

3.7.2. Deskripsi Jawaban Responden

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum, hasilnya diuraikan secara deskriptif.

Untuk memudahkan pengukuran terhadap dimensi di dalam penelitian penulis menggunakan skala *likert*. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Masing-masing indikator dalam penelitian ini diberi kategori sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju : diberi skor nilai 5
- b. Setuju : diberi skor nilai 4
- c. Cukup Setuju : diberi skor nilai 3
- d. Tidak Setuju : diberi skor nilai 2
- e. Sangat Tidak Setuju : diberi skor nilai 1

Dengan sampel sebanyak 66 orang dan di bagi ke dalam 5 kelas maka dapat diketahui bahwa skor tertinggi adalah $66 \times 5 = 330$ dan skor terendah adalah $66 \times 1 = 66$. Setelah di dapat skor tertinggi dan terendah kemudian dapat di tentukan panjang kelas dengan rumus :

$$\text{Panjang Kelas} = \left(\frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} \right)$$

$$\text{Panjang Kelas} = \frac{(66 \times 5) - (66 \times 1)}{5} = 52,8 = 53$$

Selanjutnya dengan diketahuinya jumlah kelas adalah 5 dan panjang kelas adalah 53 dapat digunakan untuk membentuk interval kelas seperti tabel dibawah berikut ini :

Tabel 3.4
Tabel Interval Kelas

No.	Kelas	Kriteria Jawaban
1	66 – 119	Tidak Baik
2	120 – 172	Kurang Baik
3	173 – 225	Cukup Baik
4	226 – 278	Baik
5	279 – 330	Sangat Baik

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Andianto, N. (2012). *Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Governance*. Palangkaraya: Bayu Media.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT.Fajar Interpretama Mandiri.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan*. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Handiwinata, B. S. (2010). *Good Governance: Konsep dan Teori, Reading Material: Demokrasi, Civil Society*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Heru Rochmansjah dan Chabib Sholeh. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- IAI, I. A. I. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, R. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. , (2004).
- Indonesia, R. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. , Pub. L. No. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (2019).
- Kusufi, A. H. dan M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi. Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Munawir. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi*

- Pemerintah.* (2010). Jakarta.
- Santosa, P. (2009). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik.”* Bandung: CV. Mandar Maju.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (14th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2016b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*. Yogyakarta: CAPS.